



TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS DI JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN MATARAM

Septian Yahya¹, Suparmanto², Syarif Hidayatullah³, Sadid Humam Zakaria⁴, Dzu Miratin Latifah⁵, Taqiyul Asfiya⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Mataram

Email: ¹yahasamanta511@gmail.com, ²suparmanto181@gmail.com, ³syarifhidayatullahc7@gmail.com,
⁴sadidhumam@gmail.com, ⁵latifahdzumiratin@gmail.com, ⁶taqiyulasfiya@gmail.com

Abstrak

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mendorong mahasiswa dan juga para dosen untuk meningkatkan kompetensi dengan melakukan kegiatan kolaborasi berbasis pendidikan di luar instansi. Tentunya, kebijakan ini juga melalui proses adaptasi di dalam pelaksanaannya di berbagai perguruan tinggi, salah satunya Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peluang dan tantangan dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar dengan studi kasus di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Setelah data diperoleh dan diolah, peneliti menganalisis masalah secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dosen di Prodi PBA memiliki pemahaman yang baik tentang konsep pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar dan mengakui pentingnya mengembangkan keterampilan bagi mahasiswa. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum merdeka belajar meliputi perubahan paradigma pembelajaran, integrasi kebijakan kurikulum dengan struktur organisasi yang ada, perubahan dalam penilaian dan evaluasi mahasiswa, serta pengembangan sumber daya pendukung seperti teknologi dan fasilitas. Sementara itu, sebagian besar mahasiswa masih perlu pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana mengembangkan keterampilan tersebut dan menerapkan dalam konteks pembelajaran mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dampak dari Kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Studi ini memberikan wawasan bagi tenaga pendidik, dosen dan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Belajar.

Kata Kunci: *Kurikulum Merdeka Belajar, Implementasi, Perguruan Tinggi*

Abstract

The Merdeka Belajar curriculum is a policy from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia that encourages students and lecturers to improve competence by conducting education-based collaborative activities outside the agency. Of course, this policy also goes through an adaptation process in its implementation in various universities, one of which is the State Islamic University of Mataram. This research was conducted to determine the opportunities and challenges of implementing the Independent Learning Curriculum with case studies in the Department of Arabic Language Education. Data collection was done by observation and interviews. After the data is obtained and processed, the researcher analyzes the problem descriptively with a qualitative approach. The results of the study show that lecturers in PBA Study Program have a good understanding of the learning concept of the Merdeka Belajar Curriculum and recognize the importance of developing skills for students. The Merdeka Belajar curriculum is a policy from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia that encourages students and lecturers to improve competence by conducting education-based collaborative activities outside the agency. Of course, this policy also goes through an adaptation process in its implementation in various universities, one of which

is the State Islamic University of Mataram. This research was conducted to determine the opportunities and challenges of implementing the Independent Learning Curriculum with case studies in the Department of Arabic Language Education. Data collection was done by observation and interviews. After the data is obtained and processed, the researcher analyzes the problem descriptively with a qualitative approach. The results of the study show that lecturers in PBA Study Program have a good understanding of the learning concept of the Merdeka Belajar Curriculum and recognize the importance of developing skills for students. However, the challenges faced in implementing the independent learning curriculum include changing learning paradigms, integrating curriculum policies with existing organizational structures, changes in student assessment and evaluation, and developing supporting resources such as technology and facilities. Meanwhile, most students still need a clearer understanding of how to develop these skills and apply them in their learning context. This study aims to examine how the impact of the Merdeka Belajar Curriculum in universities. This study provides insight for educators, lecturers, and students in facing challenges and taking advantage of opportunities for the implementation of the Merdeka Belajar Curriculum at the Merdeka Belajar Campus.

Keywords: *Independent Learning Curriculum, Implementation, Higher Education*

PENDAHULUAN

Menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kompetitif, perguruan tinggi perlu menyusun kurikulum yang tepat dan relevan sehingga daya persaingan mahasiswa semakin pesat. Ide tersebut merupakan dasar dibuatkannya kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar yang diprakarsai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim pada awal tahun 2020. Sudah hampir dua tahun kebijakan ini berjalan di institusi pendidikan dan berlaku secara nasional bagi mahasiswa maupun dosen. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam program MBKM antara lain pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi/proyek independen, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.

Sejak diberlakukannya kebijakan MBKM oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada awal 2020 dimana institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, telah mempersiapkan tenaga pengajar/dosen melalui sosialisasi. Sosialisasi ini telah didiseminasi secara nasional melalui kanal pusat Kemdikbudristek dan mengundang beberapa tokoh pendidikan serta mahasiswa. Kebijakan MBKM kini sudah berjalan di tingkat perguruan tinggi, baik

negeri maupun swasta, termasuk di lingkungan UIN Mataram.

Namun, semua kebijakan selalu diiringi dengan evaluasi, termasuk program MBKM, dimana ada beberapa poin dalam kebijakan yang perlu diadaptasi kembali sesuai dengan kondisi dan lingkungan dari perguruan tinggi. Pada dasarnya, sebuah kebijakan itu bersifat proaktif, adaptif, dan interpretatif serta memberikan ruang bagi institusi pendidikan untuk menonjolkan karakteristik mereka masing-masing (Swaramarinda, 2020). Penelitian ini membahas tantangan serta peluang yang dihadapi oleh mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Mataram dan diharapkan mampu memberikan hasil sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh kementerian terlepas dari proses adaptasi yang tidak mudah.

Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi peluang serta tantangan kebijakan MBKM yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Meskipun hampir berjalan selama 3 tahun, kebijakan MBKM ini masih memiliki kekurangan serta kelebihan yang patut didiskusikan. Implementasi dari kebijakan ini sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan ini masih belum sepenuhnya diterima di ekosistem pendidikan (Purwanti, 2021). Evaluasi ini menjadi cukup krusial tatkala daya

saing mahasiswa serta para lulusan di luar sana semakin tinggi dan inovasi lapangan pekerjaan/dunia usaha juga menuntut sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan memiliki sikap. Perguruan tinggi merupakan sebuah tempat dimana mahasiswa melalui proses penilaian secara kontinyu sehingga kualitas mereka sebagai sumber daya manusia bisa terbentuk (Vnouckova, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang mendasar dan naturalitas atau bersifat kealamian, serta tidak dilakukan di Laboratorium, melainkan dilakukan di Lapangan. Data dan sumber data pada penelitian ini terdiri dari data utama (primer) dan data pendukung (skunder). Data utama adalah data yang diambil langsung ke lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan data skunder diambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, dan verifikasi data (Suparmanto, 2023).

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah dosen kaprodi pendidikan bahasa Arab dan Mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi aktivitas mahasiswa dan dosen, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui tantangan dan

peluang implementasi kurikulum merdeka belajar di jurusan pendidikan bahasa Arab.

Setelah teknik di atas dilakukan, maka diperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini akan diuji kebenarannya dan validitasnya, dengan dua cara, yaitu triangulasi data (data triangulation) dan review informan (informant review) yaitu laporan penelitian direview oleh informan, khususnya informan kunci untuk mengetahui apakah data yang ditulis oleh peneliti merupakan sesuatu yang dapat disetujui oleh informan atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Menurut Nadiem, Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat (Ningsih, 2020).

Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, Jakarta, pada 11 Desember 2019. Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:

- a. Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
- b. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
- c. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
- d. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur

afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini (Hasim, 2020). Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan kurvei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata.

Implikasi Kurikulum Merdeka Belajar bagi Perguruan Tinggi

Kebijakan pemerintah dengan memberikan kebebasan secara otonom kepada Lembaga Pendidikan dan memerdekakan diri dari birokrasi yang berbelit serta memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk memilih program yang diinginkan. Harapan besar kebijakan ini akan melahirkan iklim kultur kampus yang otonom, birokrasi yang tidak berbelit, dan terciptanya sistem proses pembelajaran yang inovatif, kreatif dan berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern. Ekspektasi besar ini bermuara pada percepatan peningkatan mutu akademik di semua perguruan tinggi. Sedikitnya ada empat

program pokok yang akan diluncurkan oleh kemendikbud (2020), akan disoroti dalam tulisan ini, sebagai berikut:

- a. Pembukaan Program Studi Baru Upaya untuk mempermudah Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS untuk melakukan percepatan pengembangan program studi dengan birokrasi yang tidak berbelit, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi Perguruan Tinggi untuk membuka program studi baru yang mengacu pada tuntutan kebutuhan daerah, industri, dan dunia kerja. Harapan dari kebijakan ini untuk mengurangi potensi luaran program studi yang tidak terserap dunia kerja, sehingga potensial menambah jumlah pengangguran. Program studi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Pasal 24 ayat 2 secara otomatis akan mendapatkan akreditasi “Baik” dari Badan Akreditasi Nasional (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, n.d).
- b. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Program akreditasi merupakan salah satu alat ukur yang dijadikan standarisasi mutu perguruan tinggi dan program studi. Adanya akreditasi ini secara tidak langsung menuntut PT dan program studi untuk secara berkesinambungan dan terstruktur mengembangkan mutunya terutama pada aspek tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Sistem akreditasi di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi mewajibkan perpanjangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi untuk melihat progress pengembangan

mutu lembaga (Presiden Republik Indonesia, n.d). Akan tetapi, realitas yang ada di perguruan tinggi saat ini adalah perpanjangan akreditasi lima tahunan tersebut justru menjadi beban yang memberatkan, sehingga menguras seluruh sumber daya yang ada di perguruan tinggi tersebut. Hal ini justru menjadi kontra produktif karena sumber daya yang ada diforsir untuk mempersiapkan perangkat akreditasi dan dokumen fisiknya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat gebrakan terhadap pola akreditasi saat ini, dimana program studi yang baru berdiri secara otomatis akan mendapatkan akreditasi C “Cukup”, sampai PT atau program studi tersebut mengajukan re-akreditasi. memberikan statement bahwa, Program studi baru akan secara otomatis memperoleh akreditasi C dari BAN-PT tanpa harus menunggu persetujuan Kementerian. Akreditasi tersebut berlaku dari awal sampai dengan program studi tersebut mengajukan perbaikan atau re-akreditasi, dasar pijakannya adalah Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, n.d) Perguruan tinggi dan program studi baru yang telah mendapatkan akreditasi “C” berdasarkan persetujuan Menteri berhak mengajukan re- akreditasi, adapun apabila perguruan tinggi atau program studi tersebut dianggap gagal memenuhi kualifikasi untuk naik ke peringkat baik “B”, maka diharuskan untuk menunggu 2 tahun setelah keputusan dikeluarkan. Menurut berbagai pihak dengan jangka waktu 2 tahun ini dikhawatirkan dapat

memberikan masalah bagi perguruan tinggi atau program studi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan Nadiem Makarim lainnya yang menurut penulis sangat menggembirakan adalah perguruan tinggi dan program studi yang telah mendapatkan pengakuan mutu dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian secara otomatis mendapatkan akreditasi A. Diantara lembaga akreditasi internasional yang diakui pemerintah adalah EQAR, CHEA, USDE, Woshington Accor, Sydney Accord, WFME, dan lain sebagainya.

- c. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Kebijakan “Merdeka Belajar” Nadiem ketiga ini bertujuan untuk mempermudah perguruan tinggi negeri (PTN) yang belum berbadan hukum untuk menjadi PTN berbadan hukum. Kemendikbud membuat persyaratan admistratif yang mudah dan membantu PTN yang akan alih status menjadi PTN badan hukum. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk terus mengembangkan potensinya.
- d. Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester di Luar Program Studi Kebijakan Kemendikbud ini memberikan kebebasan dan otonomi bagi mahasiswa untuk mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi yang diambilnya dan di luar kampus. Kebijakan ini diapresiasi oleh berbagai kalangan, karena dianggap mampu memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya pada mata kuliah yang diinginkannya.

Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar prodi dalam satu kampus yang sama sebanyak

1 semester atau senilai dengan 20 SKS dan di luar perguruan tinggi selama 2 semester atau senilai dengan beban 40 SKS.

Tantangan dan Peluang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Prodi PBA UIN Mataram

Universitas Islam Negeri Mataram, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar, memiliki potensi besar untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di prodi PBA memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia nyata. Para mahasiswa menganggap fleksibilitas kurikulum dan pembelajaran berbasis proyek sebagai aspek yang paling positif dari Kurikulum Merdeka Belajar. Analisis data juga menunjukkan bahwa semakin lama mahasiswa terlibat dalam Kurikulum Merdeka Belajar, semakin positif persepsinya terhadap implementasinya. Penemuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar dapat meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Fleksibilitas kurikulum memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, sementara pembelajaran berbasis proyek memberikan pengalaman nyata dan penerapan keterampilan dalam konteks dunia nyata. Hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi mahasiswa terhadap implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di prodi PBA UIN Mataram, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi dan kebijakan perguruan tinggi yang lebih baik di masa depan.

Hambatan paling utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar adalah penajagan dengan mitra. Penajagan mitra ini dimulai dari pencarian mitra untuk diajak bekerjasama hingga komitmen yang dijaga oleh mitra untuk menjalankan program MBKM. Hal tersebut masih menjadi kendala sekaligus usaha yang lebih bagi program studi untuk menjangkau jaringan yang lebih luas.

Dari hasil wawancara dengan kaprodi PBA ada dua faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka belajar di prodi PBA adalah hambatan dalam penyesuaian sistem informasi akademik dan penyesuaian kurikulum, khususnya program yang terjalin di antara dua instansi yang berbeda. Para dosen mengalami kesulitan dalam penyesuaian, seperti dalam penyetaraan jumlah kredit yang diakui di dalam transkrip serta pembuatan materi perkuliahan. Para peserta program MBKM ini berasal dari latar belakang studi yang berbeda-beda sehingga materi mata kuliah bersama yang diberikan perlu diubah ulang agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa.

Hal lain yang menjadi tantangan bagi para dosen adalah kendala teknis seperti penjadwalan dan mode belajar (daring/luring). Pada penjadwalan, salah satu dosen menemukan bahwa terdapat jadwal yang berbenturan sehingga mahasiswa yang menjadi peserta kesulitan untuk mengatur waktu. Isu ini perlu menjadi perhatian bagi para dosen pembimbing serta mahasiswa dalam berkoordinasi untuk penjadwalan. Selain permasalahan penjadwalan, model pembelajaran secara daring ini juga mengurangi ruang gerak bagi para dosen dan mahasiswa untuk berkomunikasi dan bersosialisasi (Srimulyani, 2021).

Selain dosen dan mahasiswa, juga terdapat pihak lain yaitu orang tua dimana mereka memiliki kekhawatiran terhadap buah hati mereka yang mengikuti kegiatan MBKM. Dua hal utama yang menjadi kekurangan mahasiswa untuk maju dalam program MBKM adalah dana serta dukungan orang tua

mereka. Maka dari itu, dukungan orang tua sangat penting karena penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mengatakan bahwa kuatnya dukungan orang tua berbanding lurus dengan sikap adaptif mahasiswa di lingkungan mereka yang baru (Utami, 2017).

Mahasiswa pun juga akan menjadi lebih penasaran serta antusias jika sosialisasi dapat mereka ikuti dan serap dengan baik. Salah satu dosen juga mengatakan bahwa sosialisasi yang menggunakan konten serta bahasa yang mudah dimengerti bagi mahasiswa mengenai MBKM akan membantu mereka memahami program tersebut. Media sosial bisa menjadi platform yang interaktif sekaligus terjangkau bagi mahasiswa.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan visioner Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi (PT) yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: pembukaan program studi baru; sistem akreditasi perguruan tinggi; kebebasan menjadi PTN-BH dan hak belajar tiga semester di luar program studi, memberikan harapan besar bagi seluruh PT untuk melakukan percepatan dalam mengembangkan kualitas akademik masing-masing PT, baik PT yang sudah maju maupun PT yang masih dalam tahap perkembangan.
2. Tantangan dan Peluang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Prodi PBA UIN Mataram.
Peluang:

Memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia nyata. Analisis data juga menunjukkan bahwa semakin lama mahasiswa terlibat dalam Kurikulum Merdeka Belajar, semakin positif persepsinya terhadap implementasinya. Fleksibilitas kurikulum memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih

mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, sementara pembelajaran berbasis proyek memberikan pengalaman nyata dan penerapan keterampilan dalam konteks dunia nyata.

Tantangan:

Hambatan dalam penyesuaian sistem informasi akademik dan penyesuaian kurikulum, khususnya program yang terjalin di antara dua instansi yang berbeda. Para dosen mengalami kesulitan dalam penyesuaian, seperti dalam penyetaraan jumlah kredit yang diakui di dalam transkrip serta pembuatan materi perkuliahan. Para peserta program MBKM ini berasal dari latar belakang studi yang berbeda-beda sehingga materi mata kuliah bersama yang diberikan perlu diubah ulang agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo "Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar"*, 68–74.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (n.d). *Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*. Retrieved from https://lldikti5.ristekdikti.go.id/assets/files/aturan/lldikti5_5_Tahun_2020.pdf
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (n.d). *Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*.
- Ningsih, W. (2020). *Merdeka Belajar melalui Empat Pokok Kebijakan Baru di Bidang Pendidikan | Suara Guru Online*. Diakses tanggal 2021-11-16.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d). *Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Retrieved from <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/02/05/undang-undang-republik-indonesianomor-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi/>
- Purwanti, E. (2021). Preparing the Implementation of Merdeka Belajar Policy in Higher Education Institutions. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 384–391.
- Srimulyani, Y. B. (2021). The Challenges of Online Learning During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 46-57.
- Suparmanto, M. N. (2023). Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Al-Ashwat Di Dalam Meningkatkan Keterampilan Menyimak Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Mataram. *Al-Mu'arrib: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 24-31.
- Swaramarinda, K. D. (2020). Educational Policy Implementation In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 1286-1290.
- Utami, M. S. (2017). Hubungan antara Dukungan Sosial Orang Tua dengan Penyesuaian Diri Mahasiswa Baru yang Merantau. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 98-109.
- Vnouckova, H. U. (2016). Students' Evaluation of Education Quality in Human Resource Management Area: Case of Private Czech University. *ERIES Journal*, 45-51.